

**Judul** : Danantara di Persimpangan Menuju Jalur Temasek atau Jalur IMDB  
**Tanggal** : Minggu, 02 Maret 2025  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

## INVESTASI NEGARA

# Danantara di Persimpangan Menuju Jalur Temasek atau Jalur IMDB

Dalam 18 tahun terakhir saja, Indonesia sudah tiga kali membentuk lembaga pengelola dana investasi negara. Lembaga terbaru, Daya Anagata Nusantara atau Danantara, diumumkan Presiden Prabowo Subianto.

Harapannya, Danantara menyusul jejak lembaga pengelola dana investasi negara atau *sovereign wealth fund* (SWF) terbesar, Government Pension Fund Global (GPF) Norwegia, atau yang terkenal di kawasan, "Temasek Singapura. Di sisi lain, ada kekhawatiran Danantara malah menyusul IMDB Malaysia yang menjadi ladang korupsi.

Danantara adalah percobaan ketiga RI setelah Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dibentuk pada 2007, lalu ditutup pada 2015. Selanjutnya, ada Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang lebih dikenal sebagai INA.

PIP hingga Danantara dibentuk dengan harapan mulia. Syaratnya, dijalankan dengan benar.

Banyak negara telah memetik manfaat SWF. Sebut saja beberapa contoh di antaranya ialah Norwegia dan Singapura. Norwegia memiliki kekayaan minyak bumi, tetapi tidak mau bergantung pada penghasilan dari ekspor karena minyak suatu saat akan habis. Walhasil, SWF dibentuk untuk menampung uang hasil ekspor minyak. Oslo menggunakan bunga dari bunga tabungan itu untuk berbagai program pemerintah.

Sementara Temasek dibentuk pada 1974 untuk menjadi induk pengelola saham Pemerintah Singapura di berbagai

perusahaan. Kini, Temasek di peringkat ke-3 di antara SWF Singapura.

Pemilik kelolaan terbesar adalah GIC diikuti Central Provident Fund (CPF). GIC menginvestasikan uang pemerintah ke berbagai perusahaan di luar negeri. CPF mengelola dana pensiun, seperti BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Sementara Temasek memegang saham di berbagai perusahaan Singapura.

### Lembaga gagal

Tak semua SWF sukses seperti di Norwegia dan Singapura. Menggunakan pola seperti Norwegia, SWF Angola bangkrut dan dijadikan buncakan korupsi oleh keluarga Presiden Jose Eduardo Dos Santos.

La menunjuk anaknya, Isabel Dos Santos, sebagai kepala SWF. Akhirnya, lembaga itu dituding sarat dengan korupsi dan konflik kepentingan. "Hal pertama yang harus dipastikan di setiap SWF adalah kejelasan sumber-sumber dananya," kata Dinna Prapto Raharja, kala dihubungi di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Dinna, melalui lembaga kajiannya, Synergy, meneliti sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Synergy menemukan bahwa bukannya menghasilkan laba, BUMN-BUMN ini justru berutang. Ada BUMN yang berutang gaji pegawai dan tunjangan pensiun para purnakarya.

Bahkan, ada BUMN yang untuk listrik operasional harian berutang kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ada pula BUMN yang berutang kepada pihak ketiga. Menurut pene-



Muhammad Kholid



Dinna Prapto Raharja



Reyhan Noor

litian Synergy, jika BUMN itu menjual aset sekalipun, tidak bisa menutupi utangnya.

Apabila Danantara mengambil dana dari BUMN, harus ada kejelasan bahwa dana itu sudah dikurangi utang. Bisa juga utang dimasukkan ke dalam SWF, dengan catatan ada kejelasan bahwa dana itu tidak bisa balik modal hingga beberapa waktu. Ini yang membuat pengelolaan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Apabila dibandingkan dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), logika Danantara ini terkesan *arbitrary*. Tidak ada padanan dengan negara-negara lain. Pemerintah harus terang membuka landasan dan data pendiriannya kepada publik," tutur Dinna.

Ia mengamati perubahan di sektor-sektor yang potensial menjadi sumber uang Danantara. Sektor pertambangan adalah kandidat terkuat. Patut diperhatikan, pertambangan juga salah satu penyumbang emisi terbesar di dunia.

### Parameter jelas

Masukan juga diberikan oleh Koordinator Analis LAB 45 Reyhan Noor. SWF di sejumlah negara dapat dilihat berdasar-

kan pada beberapa parameter, yakni landasan hukum pendirian, ruang lingkup investasi, dan tujuan pembentukannya.

Berdasarkan status hukumnya, SWF bisa berbentuk badan yang berada di bawah langsung dari pemerintahan. GPF Norwegia, atau perusahaan milik negara untuk mengelola investasi seperti Temasek di Singapura.

Ruang lingkup investasi juga dapat menjadi karakteristik suatu SWF. GPF, misalnya, hanya boleh berinvestasi di luar negara Norwegia. Lain lagi dengan China Investment Corporation. Ada unit yang ditugasi untuk menjaga pasar modal domestik di China.

"Selain itu, ada pula SAFE Investment Corporation yang bertugas menjaga risiko kurs mata uang yuan sebagai perpanjangan tangan moneter," ujar Reyhan.

Ia menerangkan, ada beberapa faktor kunci bagi SWF untuk dapat dikatakan berhasil atau gagal. Faktor ekonomi

menjadi parameter utama. Akan tetapi, ini bukan hanya soal keuntungan yang didapat, melainkan kemampuan pengelolaan yang berkelanjutan.

Pengelolaan risiko penting dalam memetakan penyebab keberhasilan atau kegagalan. Intervensi politik yang dimotivasi oleh perilaku koruptif kerap menjadi penyebab kegagalan SWF. Korupsi menjadi sandungan utama dalam keberlanjutan SWF, mengingat jumlah dana yang dikelola sangat besar.

"Bisa kita lihat di kasus IMDB di Malaysia yang gagal memberi manfaat ekonomi. Mengawasi dan transparansi menjadi dua faktor vital dalam mengelola SWF," ucap Reyhan.

Dari sisi fiskal, pelaksanaan SWF positif bagi perekonomian karena dapat menambah penerimaan negara untuk kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, dampak ekonomi masih bergantung pada realisasi proyek yang diinvestasikan. Dalam pelaksanaannya, badan pengelola investasi di bawah Danantara juga mungkin menghadapi risiko apabila terlalu banyak eksposur kredit yang diberikan entitas BUMN, yang sama-sama berada di bawah Danantara.

### Mendukung penuh

Pihak yang mendukung penuh Danantara antara lain Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI. Walaupun begitu, Juru Bicara PKS sekaligus anggota Komisi XI DPR, Muhammad Kholid, mengatakan, ada catatan yang diberikan bersama dukungan tersebut. "Kita ingin minimal satu sam-

pai dua tahun ini memberi dukungan positif agar orang-orang yang ditunjuk di Danantara dapat bekerja dengan percaya diri," katanya.

Kholid mencermati, tipologi SWF di luar negeri terdiri atas tiga model. Model pertama adalah model dana tabungan yang dipraktikkan di Norwegia dan Abu Dhabi. Model ini biasanya berbasis hasil pendapatan dari sumber daya alam yang tidak masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Uang itu disisihkan untuk investasi jangka panjang dan surplus pendapatan tersebut mereka investasikan ulang melalui SWF.

Model kedua adalah SWF sebagai dana stabilisasi fiskal. Model ini diterapkan salah satunya di Rusia. Pendapatan dari sumber daya alam dimasukkan ke SWF yang berfungsi sebagai alat penstabil APBN. Ketika pendapatan negara kurang dana ini yang digunakan membiayai negara.

Model ketiga disebut dana pembangunan sektor strategis. Negara menisihkan dana APBN dari entitas siklus fiskal untuk dikelola sebagai instrumen bisnis. Hubungannya dengan instrumen fiskal bersifat birokratis dan tidak fleksibel, sehingga tidak adaptif sebagai pendonor untuk aksi korporasi, pengelolaannya di bawah induk utama atau dikenal *superholding*.

"Bagi entitas bisnis, ukuran penting. Semakin besar entitas, semakin baik kinerja dan efisiensi. Makin besar pula dana dan dampak investasinya," kata Kholid. (DNE/LUK/IRE)

SUDUT  
PANDANG